



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR.59 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DI WAJIBKAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2013

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kepada pejabat Negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Pejabat yang diwajibkan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di lingkungan Pemerintah Kota padang dengan Keputusan Walikota Padang.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang –undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874),sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara nomor 4150);
4. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
5. Undang -- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang perubahan peraturan Daerah No 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pejabat yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Negara yang memegang jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama wajib :
- a. Mengisi Formulir LHKPN sesuai dengan Format yang ditentukan;
 - b. Melengkapai data pendukung yang dibutuhkan;
 - c. Menyampaikan LHKPN rangkap 2 (dua) ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang tembusanya disampaikan ke walikota Padang cq. Inspektur Kota Padang, selambat – lambat nya 2 (dua) bulan terhitung sejak menjalani perubahan jabatan (pertama kali menjabat, mutasi atau pensiun)
- KETIGA : Bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruaan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 Maret 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 59.A TAHUN 2013
TANGGAL : 25 Maret 2013

PEJABAT YANG DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

NO	JABATAN
1.	WALIKOTA
2.	WAKIL WALIKOTA
3.	SEKRETARIS DAERAH
4.	INSPEKTUR
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN
6.	ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.	ASISTEN ADMINISTRASI
8.	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK
9.	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN
10.	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN
11.	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
12.	STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN
13.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
14.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
15.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
16.	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
17.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PADANG
18.	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
19.	SEKRETARIS DPRD
20.	KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
21.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
22.	KEPALA DINAS DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
23.	KEPALA DINAS KESEHATAN
24.	KEPALA DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
25.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
26.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
27.	KEPALA DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
28.	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
29.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
30.	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
31.	KEPALA DINAS PASAR
32.	KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
33.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
34.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
35.	KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
36.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
37.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKDA
38.	KEPALA BAGIAN PERTANAHAN SEKDA
39.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKDA
40.	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SEKDA
41.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA
42.	KEPALA BAGIAN UMUM SEKDA
43.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKDA
44.	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKDA
45.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SEKWAN
46.	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH SEKWAN
47.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SEKWAN
48.	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKWAN

49.	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
50.	KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN
51.	KEPALA KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI
52.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
53.	SEKRETARIS KORPRI
54.	SEKRETARIS PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
55.	SEKRETARIS BPMPKB
56.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PADANG
57.	SEKRETARIS B P B D & DAMKAR
58.	SEKRETARIS INSPEKTORAT
59.	INSPEKTUR PEMBANTU I
60.	INSPEKTUR PEMBANTU II
61.	INSPEKTUR PEMBANTU III
62.	INSPEKTUR PEMBANTU IV
63.	SEKRETARIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
64.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
65.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
66.	SEKRETARIS DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
67.	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
68.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
69.	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
70.	SEKRETARIS DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
71.	SEKERTARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
72.	SEKRETARIS DINAS PERINDAGTAMBEAN
73.	SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
74.	SEKRETARIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
75.	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
76.	SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
77.	SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
78.	SEKRETARIS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
79.	SEKRETARIS DINAS PASAR
80.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
81.	CAMAT PADANG SELATAN
82.	CAMAT PADANG TIMUR
83.	CAMAT PADANG BARAT
84.	CAMAT PADANG UTARA
85.	CAMAT NANGGALO
86.	CAMAT KURANJI
87.	CAMAT KOTO TANGAH
88.	CAMAT PAUH
89.	CAMAT LUBUK BEGALUNG
90.	CAMAT LUBUK KILANGAN
91.	CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG
ESELON III.B BAPEDALDA	
92.	KEPALA BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN
93.	KEPALA BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENCEMARAN & KERUSAKAN SDA & LINGKUNGAN
94.	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
95.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN
ESELON III.B PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	
96.	KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI
97.	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT
98.	KEPALA BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

99.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN, PARTISIPASI ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
100.	KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
101.	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
ESELON III.B BKD	
102.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN & PENGOLAHAN DATA
103.	KEPALA BIDANG MUTASI, PANGKAT DAN PENSIUN
104.	KEPALA BIDANG DIKLAT DAN PENGEMBANGAN
105.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
ESELON III.B BAPEDA	
106.	KEPALA BIDANG EKONOMI
107.	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
108.	KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA
109.	KEPALA BIDANG LITBANG DAN STATISTIK
110.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH
ESELON III.B PENANGULANGA BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
111.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAGAAN
112.	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
113.	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
114.	KEPALA BIDANG PROTEKSI KEBAKARAN DAN SDM
115.	KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
ESELON III.B PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
116.	KEPALA BIDANG POTENSI, PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL
117.	KEPALA BIDANG KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PENANAMAN MODAL
118.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
119.	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
ESELON III.B DINAS PENDIDIKAN	
120.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
121.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR
122.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
123.	KEPALA BIDANG SARANA, PRASARANA DAN ASET
ESELON III.B DINAS KESEHATAN	
124.	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
125.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN
126.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
127.	KEPALA BIDANG JAMINAN SARANA KESEHATAN
ESELON III.B DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	
128.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
129.	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
130.	KEPALA BIDANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL
131.	KEPALA BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
132.	KEPALA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
ESELON III.B DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAVIL	
133.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN
134.	KEPALA BIDANG INFORMASI KEPENDUDUKAN
ESELON III.B DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
135.	KEPALA BIDANG LALU LINTAS
136.	KEPALA BIDANG ANGKUTAN
137.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
138.	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT
139.	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ESELON III.B DINAS PEKERJAAN UMUM	
140.	KEPALA BIDANG BINA PROGRAM
141.	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
142.	KEPALA BIDANG BINA MARGA
143.	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
ESELON III.B TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	
144.	KEPALA BIDANG PEMETAAN
145.	KEPALA BIDANG TATA RUANG
146.	KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN
147.	KEPALA BIDANG PERUMAHAN
148.	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
ESELON III.B DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH	
149.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN
150.	KEPALA BIDANG BINA LEMBAGA
151.	KEPALA BIDANG BINA USAHA DAN FASILITASI PERMODALAN
152.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
ESELON III .B DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN,PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
153.	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN
154.	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
155.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN & PBJ
156.	KEPALA BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
ESELON III.B DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
157.	KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN
158.	KEPALA BIDANG OLAH RAGA
159.	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
ESELON III.B DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET	
160.	KEPALA BIDANG PENDAPATAN
161.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
162.	KEPALA BIDANG ANGGARAN
163.	KEPALA BIDANG ASET
164.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
165.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
ESELON III.B DINAS PERTAHUTBUN	
166.	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN & HOLTIKULTURA
167.	KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
168.	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN, PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN
169.	KEPALA BIDANG SARANA, PRASARANA PERTANIAN
ESELON III.B DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
170.	KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PENGEMBANGAN
171.	KEPALA BIDANG SENI DAN BUDAYA
172.	KEPALA BIDANG OBJEK DAN SARANA WISATA
173.	KEPALA BIDANG PEMASARAN
ESELON II.B KELAUTAN DAN PERIKANAN	
174.	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP
175.	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDI DAYA
176.	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
177.	KEPALA BIDANG PESISIR DAN PENGAWASAN PULAU-PULAU KECIL
ESELON III.B DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	
178.	KEPALA BIDANG KEBERSIHAN
179.	KEPALA BIDANG PERTAMANAN
180.	KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PENYULUHAN
ESELON III.B DINAS PASAR	
181.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PASAR
182.	KEPALA BIDANG PENDAPATAN
183.	KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN BANGUNAN
184.	KEPALA BIDANG KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN

ESELON III.B RUMAH SAKIT DAERAH	
185.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA
186.	KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET
187.	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS
189.	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN
ESELON III.B KECAMATAN	
190.	SEKRETARIS CAMAT PADANG BARAT
191.	SEKRETARIS CAMAT PADANG TIMUR
192.	SEKRETARIS CAMAT PADANG UTARA
193.	SEKRETARIS CAMAT PADANG SELATAN
194.	SEKRETARIS CAMAT KOTO TANGAH
195.	SEKRETARIS CAMAT NANGGALO
196.	SEKRETARIS CAMAT KURANJI
197.	SEKRETARIS CAMAT PAUH
198.	SEKRETARIS CAMAT LUBUK BEGALUNG
199.	SEKRETARIS CAMAT LBUK KILANGAN
200.	SEKRETRIS CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG

WALI KOTA PADANG

FAUZI BAHAR